

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Serangkaian guncangan telah melemahkan kondisi ekonomi global dan memperlambat pemulihan ekonomi global.

Meskipun terjadi perlambatan global, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat pada tahun 2022 berkat meningkatnya harga-harga komoditas dan pembukaan kembali ekonomi.

Kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global, namun tidak terlindung dari tekanan harga.

Kerentanan eksternal Indonesia rendah hingga sedang karena ekspor yang kuat telah berdampak pada surplus neraca, meskipun keuangan global yang lebih ketat telah memberi tekanan pada neraca modal.

I. Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini

Perang Rusia-Ukraina telah mengganggu perdagangan global dan rantai pasokan, membuat harga komoditas dan pangan global semakin meningkat. Inflasi global yang terus-menerus tinggi disertai dengan pertumbuhan yang lemah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya stagflasi yang dapat bertahan selama beberapa tahun. Di tengah kondisi ini, Bank Sentral (Federal Reserve) AS dan bank sentral negara-negara maju lainnya secara tajam memperketat kebijakan moneter untuk meredam inflasi. Ini mengakibatkan kondisi pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan tekanan keuangan untuk beberapa negara pasar berkembang dan negara berkembang (emerging markets and developing economies, EMEs) karena arus modal keluar semakin meningkat.

Pertumbuhan PDB riil telah meningkat dari 3,7 persen pada tahun 2021 menjadi 5,4 persen yoy (tahun-ke-tahun) pada tiga kuartal pertama tahun 2022. Lonjakan harga batu bara dan minyak kelapa sawit sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina telah menghasilkan pendapatan perusahaan yang sangat besar. Penurunan tingkat penularan COVID dan program vaksinasi yang sukses telah mendorong pencabutan pembatasan mobilitas. Ini mengakibatkan pelepasan permintaan yang tertahan (pent-up demand) dan menyebabkan akselerasi tajam dalam konsumsi swasta. Sektor layanan transportasi dan komunikasi, perdagangan, dan perhotelan, serta manufaktur makanan, tekstil, dan logam dasar, tumbuh paling cepat. Tingkat pengangguran turun di bawah 6 persen dan upah rata-rata naik 12 persen dalam setahun namun tetap berada dibawah tingkat sebelum pandemi.

Inflasi meningkat hingga mencapai 5,7 persen (yoy) pada bulan Oktober. Tekanan harga didorong oleh kenaikan harga komoditas internasional, kenaikan tarif energi dalam negeri, dan kenaikan harga produsen. Transmisi harga produsen ke harga konsumen, bagaimanapun juga, telah dibatasi oleh mekanisme kontrol harga, khususnya di bidang energi dan pertanian. Perkiraan akan meningkatnya inflasi menyebabkan terjadinya penurunan sentimen konsumen, terlihat dalam survei konsumen Bank Indonesia. Harga makanan dan bahan bakar yang lebih tinggi menggerus daya beli, dengan dampak yang berbeda-beda di seluruh kelompok pendapatan. Harga makanan naik 7,9 persen yoy pada bulan September 2022. Hal ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi swasta sebesar 3,7 persen untuk kelompok 40 terbawah dan 2,8 persen untuk kelompok 20 teratas¹.

Ekspor komoditas telah meningkatkan surplus neraca transaksi berjalan dari 0,2 persen dari PDB pada 3 Triwulan-2021 menjadi 0,9 persen dari PDB pada 3 Triwulan-2022. Ekspor non-komoditas seperti kendaraan bermotor, mesin listrik, serta alas kaki dan pakaian juga memberikan kontribusi hampir separuh pertumbuhan ekspor. Ini telah membantu mengimbangi tekanan dari peningkatan impor. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi kondisi keuangan eksternal yang lebih ketat seperti negara berkembang lainnya. Arus keluar utang portofolio meningkat sejak bulan Juli, sejalan

¹ Ini mengacu pada 40 persen penduduk terbawah di Indonesia berdasarkan distribusi pengeluaran. Kategori ini mencakup kelompok miskin, rentan secara ekonomi, dan beberapa rumah tangga berpendapatan menengah. Kelompok 20 teratas mengacu pada 20 persen segmen penduduk yang lebih kaya menurut distribusi pengeluaran.

dengan siklus kenaikan suku bunga Bank Sentral AS dan meningkatkan tekanan pada nilai tukar. Tetapi kebutuhan pembiayaan kembali jangka pendek tetap rendah (2,1 persen dari PDB) dan cadangan devisa tetap mencukupi (mampu membiayai impor selama 6 bulan). Kebijakan makroekonomi yang baik serta ketidakseimbangan internal dan eksternal yang rendah telah membantu meredam persepsi pasar terhadap risiko kredit negara.

Pemerintah telah menjalankan defisit fiskal yang kecil dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Defisit tersebut diperkirakan akan melebar menjadi 2,7 persen dari PDB untuk setahun penuh karena adanya beban belanja yang tertahan termasuk kompensasi kepada BUMN. Total pendapatan bertumbuh sebesar 45,8 persen dalam tiga triwulan pertama tahun 2022, pertumbuhan dengan basis yang luas di seluruh kategori pendapatan utama. Pengeluaran pemerintah secara signifikan dikurangi dengan pengurangan penanggulangan COVID yang luar biasa. Namun upaya ini sebagian diimbangi oleh tagihan subsidi energi dan biaya bunga yang meningkat. Pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar pada bulan September untuk mengurangi tekanan fiskal, tetapi penghematan fiskal ini sebagian besar akan terakumulasi di tahun-tahun mendatang. Penyesuaian harga tersebut diperkirakan telah memangkas total kewajiban subsidi BBM pemerintah hanya sebesar 0,1 persen dari PDB pada tahun 2022, dan sebesar 0,4 persen dari PDB pada tahun 2023-2025. Subsidi bahan bakar tetap besar, diperkirakan rata-rata sebesar 1,8 persen dari PDB per tahun pada tahun 2023-25. Untuk mengatasi biaya subsidi tersebut, juga dibutuhkan pendalaman cakupan bantuan sosial dan sistem asuransi sosial untuk melindungi daya beli kelompok-kelompok rentan.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 175 bps antara bulan Agustus dan November (dari 3,5 menjadi 5,25 persen). Pengetatan moneter berdampak pada biaya pinjaman yang sudah tinggi, yang membebani investasi dan pertumbuhan. Di saat BI menormalisasi kebijakan moneter, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas/broad money (M2) juga menurun. Pada saat yang sama, Rupiah menjadi lebih tahan terhadap gejolak aliran modal dari waktu ke waktu, yang dapat memberikan ruang untuk mengurangi laju pengetatan moneter. Selain itu, eksposur Indonesia terhadap eksternal telah menurun – porsi pinjaman eksternal kepada pemerintah dan korporasi terhadap total PDB telah turun hingga di bawah tingkat pra-pandemi.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,2 persen dan rata-rata sebesar 4,8 persen dalam jangka menengah (2023-25). Namun demikian, risiko penurunan cukup besar dan dapat sangat membebani pertumbuhan Indonesia jika terwujud. Permintaan global yang lebih lemah, keuangan global yang lebih ketat, arus keluar modal yang meluas, dan tekanan mata uang dapat memicu siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Inflasi rata-rata diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 4,5 persen, lalu berada di batas atas BI dengan rata-rata 3,5 persen selama 2024-2025. Defisit fiskal diproyeksikan tetap berada di bawah 3 persen dari target PDB pemerintah pada tahun 2023 karena penerimaan dari reformasi pajak terwujud dan pengeluaran terkait COVID dihentikan. Posisi eksternal diproyeksikan sedikit memburuk dengan risiko kerentanan rendah hingga sedang. Neraca transaksi berjalan diproyeksikan berubah menjadi defisit kecil dalam jangka menengah.

Rencana konsolidasi fiskal pada tahun 2022 didukung oleh pajak yang lebih tinggi akibat dari pemulihan ekonomi dan meningkatnya harga-harga komoditas, serta pengeluaran yang lebih rendah terkait penanggulangan COVID.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakannya untuk menahan laju inflasi dan membatasi aliran modal keluar meskipun kondisi ekonomi saat ini memungkinkan adanya ruang untuk mengurangi laju pengetatan dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Indonesia diproyeksikan akan mempertahankan pemulihannya selama tiga tahun ke depan meskipun dengan risiko penurunan yang signifikan yang berasal dari lingkungan ekonomi global.

Untuk mengatasi tantangan kebijakan makro-fiskal saat ini, IEP ini menyoroti tiga bidang kebijakan dan kelembagaan yang mungkin memerlukan perhatian ke depannya.

Sejarah, besaran, lokasi, demografis, dan kekayaan sumber daya Indonesia sangat berperan bagi potensi perdagangan internasional yang besar.

Terlepas dari potensi ini, pertumbuhan sektor perdagangan Indonesia telah tertinggal dari ekspansi perdagangan global selama empat dekade terakhir ini.

Setelah terjadinya Krisis Keuangan Asia, keterbukaan perdagangan Indonesia berkurang lebih dari setengahnya, bertepatan dengan periode deindustrialisasi.

Dengan hanya 1,1 persen dari ekspor manufaktur global, Indonesia memiliki ruang lingkup yang signifikan untuk membangun keunggulan komparatifnya guna mendorong pertumbuhan dan diversifikasi ekspor.

Yang pertama adalah melanjutkan pelaksanaan reformasi perpajakan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pemungutan pajak usaha. Ini akan membantu menciptakan ruang fiskal untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi terhadap guncangan. Yang kedua terkait dengan pengeluaran publik di mana pihak berwenang dari waktu ke waktu dapat beralih ke model penetapan harga berbasis peraturan bagi energi untuk menahan tekanan subsidi. Ketiga, meningkatkan target dan memperluas cakupan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang ada. Ini berarti mengisi celah cakupan, mengembangkan sistem yang memberikan jaminan perlindungan minimum di seluruh siklus hidup, dan memperkuat sistem pelaksanaan.

II. Perdagangan untuk pertumbuhan dan transformasi ekonomi di Indonesia

Berposisi strategis di antara dua benua dan di persimpangan banyak jalur perdagangan, Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang signifikan, memiliki ekonomi yang besar, dan tenaga kerja yang berada di ambang bonus demografi. Perdagangan juga sangat terkait dengan sejarah Indonesia, karena negara ini secara historis dikenal dengan para pedaganginya, kekayaan rempah-rempahnya, dan sumber dayanya. Indonesia adalah negara terbesar ke-4 dalam hal jumlah penduduk, ke-16 terbesar secara ekonomi, namun hanya ke-25 dalam hal ekspor.

Antara tahun 1980-2020, perdagangan riil barang dan jasa dunia tumbuh rata-rata mendekati 5 persen, yang menyebabkan peningkatan volume perdagangan global lebih dari tujuh kali lipat. Pertumbuhan perdagangan dunia ini didukung oleh penurunan tajam biaya perdagangan, kemajuan teknologi informasi, upaya liberalisasi perdagangan, dan perluasan rantai nilai global (global value chains, GVCs). Selama periode yang sama, ekspor barang dan jasa Indonesia hanya berkembang setengahnya. Sebaliknya, volume total ekspor Malaysia, Thailand, dan Filipina meningkat lebih dari 12 kali lipat.

Rasio perdagangan terhadap PDB Indonesia turun dari 72 persen pada tahun 2000 menjadi 33 persen pada tahun 2020, terendah di antara negara-negara tetangga. Bersama dengan penurunan keterbukaan perdagangan, kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia juga turun secara signifikan, dari puncaknya sebesar 31 persen tahun 2002 menjadi 19 persen pada tahun 2021. Dibandingkan dengan negara-negara pembanding di kawasan, penurunan pangsa manufaktur ini dimulai pada tingkat PDB per kapita dan pembangunan yang lebih rendah.

Porsi Indonesia dalam ekspor dunia stagnan dan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara pembanding di kawasan. Ekspor juga terkonsentrasi pada industri padat sumber daya dan memiliki kecanggihan yang terendah di antara negara-negara yang setara di Asia Timur. Ketergantungan terhadap komoditas membuat Indonesia rentan terhadap ketidakstabilan harga komoditas dan rentan terhadap Dutch Disease. Potensi jasa untuk berkontribusi pada perdagangan dan pertumbuhan di Indonesia sangatlah besar tetapi sebagian besar masih belum dimanfaatkan.

Kebijakan melihat kedalam (inward looking), serta kendala struktural terhadap pertumbuhan usaha dan ekspor, membebani daya saing internasional Indonesia.

Kebijakan subsidi impor sebesar 35 persen akan mengganggu manufaktur dan investasi dalam negeri.

Kebijakan perdagangan restriktif meningkatkan harga pangan dalam negeri, dan tidak hanya merugikan konsumen Indonesia saja, tetapi juga petani, yang dua pertiganya adalah net konsumen produk pangan.

Kerangka kebijakan perdagangan yang mendukung dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang dan transformasi ekonomi Indonesia.

Merampingkan dan menghilangkan NTM yang tidak perlu dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, meningkatkan PDB sebesar 5 persen.

Penurunan tarif impor telah diimbangi dengan meningkatnya Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Measures, NTM), yang pada gilirannya menghasilkan kerangka kebijakan perdagangan yang kurang transparan. Terlepas dari kemajuan baru-baru ini, NTM terus memberi beban yang signifikan pada dunia usaha di Indonesia, setara dengan rata-rata tarif 30 persen, lebih tinggi daripada di negara-negara lain di kawasan. Selain hambatan perdagangan barang, pembatasan perdagangan jasa tetap termasuk yang tertinggi di dunia, meskipun ada reformasi baru-baru ini. Dalam hal lingkungan pendukung logistik dan fasilitasi perdagangan, diperlukan adanya reformasi tambahan untuk mengurangi waktu, biaya, dan ketidakpastian transaksi lintas batas. Meskipun perjanjian perdagangan telah menjadi sarana penting untuk mewujudkan reformasi perdagangan di Indonesia, masih ada ruang untuk meningkatkan konten dan cakupannya.

Impor sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia, untuk penambahan nilai domestik dan ekspor, khususnya di sektor manufaktur bernilai tambah tinggi dan sektor-sektor prioritas. Substitusi impor juga akan sangat membebani investasi, ketergantungan pada impor barang modal dan mesin yang tidak tersedia di dalam negeri. Hampir dua pertiga ekspor Indonesia dihasilkan oleh eksportir dan importir, yang menunjukkan pentingnya impor untuk daya saing ekspor. Eksportir yang juga importir terbukti lebih produktif, mengekspor lebih sering dan ke lebih banyak tujuan ekspor dibandingkan dengan eksportir non importir. Kebijakan yang ada seperti persyaratan kandungan lokal (local content requirements, LCR), persetujuan impor, sertifikasi dengan standar nasional dan NTM yang memberatkan lainnya sering digunakan dengan tujuan substitusi impor, merugikan bagi daya saing internasional Indonesia.

Konsumen Indonesia membayar harga beras dan makanan pokok lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sementara keterjangkauan pangan tetap menjadi tantangan yang penting. Harga makanan pokok yang lebih tinggi sebagian disebabkan oleh hambatan perdagangan pertanian. Di antaranya, NTM berupa persyaratan perizinan impor, pembatasan pelabuhan masuk, dan monopoli impor menyebabkan harga pangan tetap tinggi sementara reformasi kebijakan dapat menurunkan harga pangan dalam negeri hingga 40 persen.

Reformasi yang ditargetkan untuk mengurangi biaya masukan manufaktur yang diimpor, meningkatkan akses perusahaan ke pasar-pasar yang baru dan yang sudah ada, sambil mengatasi hambatan domestik yang tersisa, berperan penting untuk mewujudkan potensi perdagangan. Diperlukan adanya reformasi kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk merampingkan dan menghilangkan NTM yang tidak perlu, menghilangkan hambatan perdagangan jasa, memperdalam dan memperluas perjanjian perdagangan, serta meningkatkan kinerja logistik dan fasilitasi perdagangan. Secara keseluruhan, kerangka kebijakan perdagangan yang terbuka, stabil, transparan, dan dapat diprediksi akan menjadi sangat penting.

Reformasi NTM, seperti persetujuan impor, sertifikasi wajib dengan standar nasional, dan pembatasan pelabuhan masuk, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar. Reformasi NTM tersebut diperkirakan meningkatkan ekspor industri manufaktur maju bernilai tambah tinggi (komputer, produk elektronik dan optik, peralatan transportasi, peralatan listrik dan farmasi dasar). Reformasi NTM juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor dan diversifikasi perusahaan Indonesia, membantu menaikkan tingkat kelangsungan hidup mereka di pasar ekspor, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bertahan terhadap guncangan ekonomi dan berkontribusi dalam menurunkan harga makanan pokok dan meningkatkan hasil-hasil gizi.

Mengingat hubungan yang kuat antara Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment, FDI) dan perdagangan jasa, reformasi untuk menghilangkan kendala perdagangan jasa akan menjadi penting untuk mewujudkan potensi reformasi investasi baru-baru ini.

Perjanjian perdagangan yang mendalam dan komprehensif dapat menjadi sarana untuk perluasan perdagangan, diversifikasi, integrasi rantai nilai global (global value chain, GVC), dan peningkatan ke industri bernilai lebih tinggi.

Indonesia dapat meningkatkan kinerja fasilitasi logistik dan perdagangan melalui reformasi tambahan yang akan memberikan manfaat tambahan.

Yang terakhir, untuk mendapatkan manfaat dari transisi global dan dalam negeri menuju ekonomi rendah karbon, Indonesia dapat memperkuat kebijakan saling melengkapi antara kebijakan perdagangan dan iklim.

Melonggarkan pembatasan yang tersisa pada masuknya orang asing, pergerakan para profesional asing, dan persaingan akan menjadi kunci untuk mendorong diversifikasi Indonesia ke dalam penyediaan jasa dan meningkatkan pelayanan ekonomi dalam negeri. Pembatasan ini mengurangi daya saing layanan jasa dalam negeri, yang mungkin menguntungkan para penyedia jasa, tidak hanya melalui meningkatnya harga yang harus dibayar oleh konsumen, tetapi juga dengan meningkatnya biaya masukan layanan dan mengganggu produktivitas. Pembatasan perdagangan jasa dapat sangat merugikan, mengingat peran jasa yang semakin meningkat dalam perekonomian Indonesia dan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas secara agregat.

Komitmen dalam perjanjian perdagangan yang melampaui masalah akses pasar tradisional dan mencakup ketentuan seperti kebijakan persaingan, hak atas kekayaan intelektual, perdagangan negara, perlindungan lingkungan hidup, masalah pasar tenaga kerja dan pengadaan publik, akan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota dan mengurangi cakupan perdagangan yang dialihkan ke negara-negara non-anggota. Dampak ini bahkan lebih terasa dalam kasus perdagangan GVC dan untuk manufaktur dan layanan lanjutan serta kegiatan-kegiatan inovatif. Pada gilirannya, peningkatan akses ke pasar luar negeri melalui perjanjian perdagangan yang baru dan lebih dalam serta diversifikasi ekspor dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan terhadap guncangan di Indonesia. Ketentuan yang mendalam dan komprehensif dalam perjanjian perdagangan juga merupakan komitmen terhadap reformasi dalam negeri, dan bertindak sebagai 'asuransi' (pengganti kerugian) terhadap potensi peningkatan proteksionisme.

Pelaksanaan komitmen fasilitasi perdagangan dan langkah-langkah fasilitasi perdagangan nirkertas (paperless) lainnya di tingkat negara ASEAN memiliki potensi yang tinggi untuk menurunkan biaya, sebesar 2,6 persen, dan penambahan langkah-langkah fasilitasi perdagangan nirkertas, dapat menurunkan biaya perdagangan hingga 8 persen. Pelaksanaan National Logistics Ecosystem (NLE) akan membantu Indonesia meningkatkan kinerja perdagangan dan logistiknya, mengurangi biaya perdagangan, dan meningkatkan kepastian pengapalan. Hal ini juga akan menghasilkan manfaat bagi pemerintah melalui efisiensi dalam penyebaran sumber daya, kepatuhan para pedagang yang lebih tinggi, dan peningkatan keamanan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi lintas lembaga perbatasan dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan perdagangan dan mengurangi biaya perdagangan.

Meningkatnya permintaan global terhadap barang dan teknologi untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi iklim, memberi Indonesia peluang untuk melakukan diversifikasi produksi dan meningkatkan ekspor produk dan teknologi hijau. Selain itu, akses ke barang dan teknologi ramah lingkungan dengan biaya lebih rendah dan kualitas lebih tinggi melalui impor juga akan mendukung transisi Indonesia yang rendah karbon dan tahan iklim. Dalam konteks ini, menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan pembangunan hijau sangatlah penting. Reformasi perdagangan seperti menghilangkan NTM yang memberatkan dan mahal pada impor barang-barang hijau, mengurangi ketatnya persyaratan kandungan lokal, menyelaraskan standar nasional dengan standar internasional, dan berperan serta dalam inisiatif kebijakan perdagangan plurilateral dan multilateral mengenai perdagangan dan perubahan iklim akan meningkatkan daya saing Indonesia yang ramah lingkungan.